



RSUD. LABUANG BAJI
Provinsi Sulawesi Selatan

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2022

Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Makassar
Telp. (0411) 872120 –873482 Fax. (0411) 830454
E-mail : rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB V PENUTUP	56

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dapat disusun tepat waktu.

Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan merupakan acuan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan peraturan secara terperinci dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 ini merupakan kegiatan rutin tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Kerja Tahun 2022 yang telah disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta RENSTRA RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja merupakan dasar perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, acuan operasional, alat pengendalian dan dasar akuntabilitas. Rencana Kerja berisi tentang Latar Belakang, Maksud, Tujuan, Landasan Hukum, hubungan Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, isu-isu strategis, dan kebijakan serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 serta rencana pembiayaannya.

Kami berharap bahwa Rencana Kerja ini dapat mengantarkan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pelayanan kesehatan pada tahun 2022 untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat/Pasien.

Makassar, Juli 2021

Direktur,

drg. ABDUL HARIS NAWAWI, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199402 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana jangka Panjang Nasional (RJPN) tahun 2005-2025.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta mengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut dan keluarga miskin dilain pihak.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melau salah satu kebijakan dan agenda utama yang tetuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yakni Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan keberadaan RSUD Labuang Baji Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk mewujudkan Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, yaitu “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif,

Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan menjadi Provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Untuk mendukung Visi Sulawesi Selatan tersebut, maka RSUD Labuang Baji mempunyai visi “Menjadi Rumah Sakit Unggulan Provinsi yang Inovatif dan Kompetitif Tahun 2023” yang diharapkan bersinergi dan mendukung pencapaian target serta tujuan pembangunan, khususnya pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rancangan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Rancangan Renja ini juga merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan acuan sekaligus hasil kesepakatan lanjutan bagi seluruh komponen RSUD Labuang Baji dalam menjalankan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022. Rancangan Renja ini juga mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang merupakan akumulasi dari seluruh Rancangan Renja OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan akan dipakai sebagai bahan Musyawarah Pembangunan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022. Atas dasar hal

tersebut maka penyusunan Rancangan Renja Tahun 2022, merupakan tahapan mekanisme perencanaan yang sangat penting untuk dilakukan.

RSUD Labuang Baji yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pusat rujukan regional yang ada di Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit di Sulawesi Selatan. Keberadaan sumber daya manusia yang terdiri dari Dokter Spesialis dan Subspesialisasi/Konsultan serta tenaga paramedis yang terlatih sesuai dengan kompetensinya diharapkan mampu menyandang sebagai pusat rujukan tersebut.

Terkait dengan Rencana Kerja Tahun 2022, maka sasaran, arah kebijakan, dan tujuan yang ingin dicapai oleh RSUD Labuang Baji dalam rangka menghadapi dan menjawab isu strategis tersebut melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatannya selama satu tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 masing-masing sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target sesuai dengan kebijakan yang ditempuh RSUD Labuang Baji dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Replik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 19) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 20) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 - 21) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 22) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 30) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
- 31) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 36) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 37) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan perencanaan pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
- 40) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
- 41) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);

- 42) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
- 43) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
- 44) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
- 45) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
- 46) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 tentang Penetapan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai SKPD untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dan sesuai

dengan tujuan rencana strategis yaitu menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD) Tahun 2018-2023), terutama yang terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pelayanan kesehatan dalam menentukan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2022;
- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan anggaran;
- c. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- d. Terciptanya pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi tentang Penyusunan Renja RSUD Labuang Baji Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar regulasi sebagai acuan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen.

- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Berisi Evaluasi Rencana Strategis, Evaluasi Kinerja Renja Perangkat Daerah dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun lalu.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Labuang Baji
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Labuang Baji.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Labuang Baji.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD LABUANG BAJI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD Labuang Baji.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar dilakukan perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam Renstra dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Hasil Evaluasi Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. PENINGKATAN KINERJA DALAM RANGKA PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji, maka dilaksanakan program peningkatan kinerja dalam rangka penguatan kelembagaan yang diselenggarakan melalui 3 program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja.

Adapun program dan kegiatan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Tabel 1.
Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.399.727.488,65	5.373.742.790,00	25.984.698,65	99,52
1	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	5.160.000.000,00	5.155.700.000,00	4.300.000,00	99,92
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	45.704.500,00	45.704.500,00	-	100,00
3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	194.022.988,65	172.338.290,00	21.684.698,65	88,82

Pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 5.399.727.488,65 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.373.742.790,00 atau 99,52% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 25.984.698,65.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.

Tabel 2.
Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	381.315.000,00	381.315.000,00	-	100,00
1	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	381.315.000,00	381.315.000,00	-	100,00

Pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 381.315.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 381.315.000,00 atau 100%.

3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Tabel 3.
Realisasi Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
III.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	110.000.000,00	92.874.600,00	17.125.400,00	84,43
1	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	50.000.000,00	38.093.500,00	11.906.500,00	76,19
2	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
3	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	50.000.000,00	44.781.100,00	5.218.900,00	89,56

Pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 110.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.874.600,00 atau 84,43% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 17.125.400,00.

B. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan RSUD Labuang Baji, maka dilaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan melalui 4 program sebagai berikut :

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Organisasi Dan Tata Laksana BLUD;
3. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan;
4. Program Pengadaan Obat-Obatan, Makan Minum Dan Logistik Rumah Sakit/UPTD Kesehatan.

Adapun program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan.

Tabel 4.
Realisasi Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan;
Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
I.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	20.632.722.692,02	20.347.376.180,00	285.346.512,02	98,61
1	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	16.718.837.042,02	16.604.170.180,00	114.666.862,02	99,31
2	Pembangunan Tahap III Gedung A & B dan Gedung Perawatan Anak Rumah Sakit	3.814.215.650,00	3.645.246.000,00	168.969.650,00	95,57
3	Pengadaan Media Promosi Kesehatan RS / CHT	99.670.000,00	97.960.000,00	1.710.000,00	98,28

Pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 20.632.722.692,02 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.347.376.180,00 atau 99,31% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 285.346.512,02.

2. Program Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana BLUD.

Tabel 5.
Realisasi Program Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana BLUD
Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD	109.778.842.707,00	97.209.667.560,00	12.569.175.147,00	88,55
1	Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan Masyarakat	109.778.842.707,00	97.209.667.560,00	12.569.175.147,00	88,55

Pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 109.778.842.707,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 97.209.667.560,00 atau 88,55% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.569.175.147,00.

3. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan

Tabel 6.
Realisasi Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
III.	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	1.375.633.470,00	1.174.261.629,00	201.371.841,00	85,36
1	Pengadaan / Pemeliharaan Instalasi Sarana Dan Prasarana RS	1.375.633.470,00	1.174.261.629,00	201.371.841,00	85,36

Pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 1.375.633.470,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.174.261.629,00 atau 85,36% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 201.371.841,00.

4. Program Pengadaan Obat-Obatan, Makan Minum Dan Logistik Rumah Sakit/UPTD Kesehatan.

Tabel 7.
Realisasi Program Pengadaan Obat-Obatan, Makan Minum Dan Logistik Rumah Sakit/UPTD Kesehatan Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
IV.	PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	800.000.007,00	475.087.105,00	324.912.902,00	59,39
1	Pengadaan Bahan Habis Pakai	800.000.007,00	475.087.105,00	324.912.902,00	59,39

Pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 475.087.105,00 atau 59,39% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 324.912.902,00.

C. REALISASI ANGGARAN

Di dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi yang ada pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran. Adapun sumber pembiayaan pada tahun 2020 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

Pada Tahun Anggaran 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar Rp. 109.778.842.707,00. dapat direalisasikan sebesar Rp 107.693.777.905,00 atau 98,10%. realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah RSUD Labuang Baji
Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.778.842.707,00	107.693.777.905,00	98,10
1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	109.778.842.707,00	107.693.777.905,00	98,10

2. BELANJA

Untuk Tahun Anggaran 2020, Pagu Anggaran RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak Rp. 214.270.605.563,42 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 197.303.334.511,00 atau 92,08%. yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Total alokasi pagu anggaran untuk belanja tidak langsung pada RSUD Labuang Baji sebesar Rp. 75.792.364.198,75 dengan realisasi Rp. 72.249.009.647,00 atau 95,32%.

b. Belanja Langsung

Total alokasi pagu anggaran untuk belanja langsung pada RSUD Labuang Baji sebesar Rp. 138.478.241.364,67 dengan realisasi anggaran Rp. 125.054.324.864,00 atau 90,31% yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.421.891.728,65 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 59.710.756.835,00 atau 82,45%;
2. Belanja Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.056.349.636,02 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.343.568.029,00 atau 98,42%.

Berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, maka realisasi program/kegiatan dapat dijelaskan antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan semua memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sekalipun tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan namun 99,97% realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Meskipun ada satu kegiatan yang realisasi keuangan hanya mencapai 59,39% akan tetapi outputnya mencapai 100% disebabkan karena sisa realisasi keuangan dimasukkan sebagai utang dalam laporan keuangan tahun anggaran 2020.
2. Implikasi terhadap target capaian program Renstra SKPD
 - a. Profesionalisme manajemen rumah sakit mengalami perkembangan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
 - b. Organisasi rumah sakit dikembangkan menjadi *customer oriented organization* dengan peningkatan kualitas pelayanan medik dan non medik untuk memenuhi tuntutan dan kepuasan konsumen/pelanggan.
 - c. Kualitas pelayanan rumah sakit telah terakreditasi versi SNARS.
 - d. Profesionalisme tenaga paramedis keperawatan dan non keperawatan dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan profesi masing-masing.
3. Kebijakan perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan BLUD, RSUD Labuang Baji senantiasa mengusulkan kegiatan melalui Dana Transfer dalam hal ini Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DBH-CHT.

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan) dapat diuraikan pada Tabel TC. 29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan)
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : RSUD Labuang Baji

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program , Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	02				Kesehatan									
1	02				Rumah Sakit umum Labuang Baji									
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
						Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
						Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	99,70%	97,00%	97,00%	98,00%	100%	99,00%	99,00%	99,30%
1	02	01	01.1.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	-	90%	90%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	01.1.01	01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1	02	01	01.1.01	01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	02	01	01.1.01	01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	02	01	01.1.01	01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	01.1.01	01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	02	01	01.1.01	01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Fisik dan Anggaran yang tersusun dan dilaporkan	1 Dokumen	-	-	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	02	01	01.1.01	01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
1	02	01	01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	90%	90%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	01.1.02	01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	8190 OB	-	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
1	02	01	01.1.02	01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Laporan	-	-	-	0%	12 Laporan	12 Laporan	50%
1	02	01	01.1.02	01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	0 Laporan	0 Laporan	0%
1	02	01	01.1.02	01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan	2 Laporan	-	-	-	0%	2 Laporan	2 Laporan	100%
1	02	01	01.1.02	01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD yang tersusun	18 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%
1	02	01	01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100%	-	-	-	0%	100%	100%	100%
1	02	01	01.1.03	01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	3 Laporan	-	-	-	0%	3 Laporan	3 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program , Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian kinerja ASN	100%	-	98%	-	0%	100%	100%	100%
1	02	01	01.1.05	01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	0 Orang	-	-	-	0%	0 Orang	0 Orang	0%
1	02	01	01.1.05	01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	12 Laporan	-	-	-	0%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1	02	01	01.1.05	01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur PD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	-	557 Orang	-	0%	0 Orang	0 Orang	0%
1	02	01	01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	01.1.06	01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	35 Kali	20 Kali	25 Kali	25 Kali	100%	35 Kali	35 Kali	100%
1	02	01	01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	60%	85%	85%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	01.1.07	01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	2 Unit	90 Unit	90 Unit	90 Unit	100%	1 Paket	1 Paket	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	80%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	01.1.08	01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gedung RS yang Terpelihara Kebersihannya	7 Gedung	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Paket	1 Paket	14%
						Jumlah Jasa Pegawai Pemerintah Non ASN yang terbayarkan	2628 OB	-	190,00	190,00	100%	1 Tahun	1 Tahun	0%
1	02	01	01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	85%	85%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	01.1.09	01.1.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	5 Unit	-	5 Unit	1 Unit	20%	5 Jenis	5 Jenis	100%
1	02	01	01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pendapatan BLUD	10%	100%	100%	100%	100%	8,70%	8,70%	87%
1	02	01	01.1.10	01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD	55.000.000.000,00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	91%
1	02	1.02.02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik	90%	40%	40%	40%	100,00%	70%	70%	78%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Labuang Baji	100%	80%	85%	85%	100%	100%	100%	100%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	0 Paket	0 Paket	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program , Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan/ alat penunjang yang diadakan	37 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	50 Jenis	50 Jenis	135%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara	50 Jenis	-	1 Paket	-	0%	0 Jenis	0 Jenis	0%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya	Jumlah habis pakai lainnya yang diadakan	100 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	175 Jenis	175 Jenis	175%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara	0 Unit	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	0 Paket	0 Paket	0%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara	3 Unit	-	1 Paket	-	0%	0 Paket	0 Paket	0%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya yang diadakan	50 Jenis	-	12 Bulan	-	0%	35 Jenis	35 Jenis	70%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Promosi Pelayanan Kesehatan di RS	100%	100%	85%	-	0%	100%	100%	100%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.02	1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Jenis	-	1 Paket	-	0%	0 Jenis	0 Jenis	0%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan ketersediaan Sistem Informasi RS yg Terintegrasi	100%	-	-	-	0%	100%	100%	100%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.03	1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Layanan Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola	10 layanan	-	1 Aplikasi	-	0%	0 Aplikasi	0 Aplikasi	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program , Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Per kiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	1.02.02	1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan peningkatan standar pelayanan kesehatan	100%	80%	100%	-	0%	100%	100%	100%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.04	1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8 Izin	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	0 Izin	0 Izin	0%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.04	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah survey akreditasi RS yang dilaksanakan	1 Kali	-	30 Orang	-	0%	1 Kali	1 Kali	100%
1	02	1.02.03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	65%	40%	40%	40%	100,00%	50%	50%	77%
1	02	1.02.03	1.02.03.1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	-	-	-	0%	0%	0%	0%
1	02	1.02.03	1.02.03.1.01	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Laporan	-	-	-	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
1	02	1.02.03	1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	80%	85%	-	0%	100%	100%	100%
1	02	1.02.03	1.02.03.1.02	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai RS yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi SDM	35 Orang	70 Orang	130 Orang	-	0%	150 Orang	150 Orang	429%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan pelayanan rumah sakit memiliki indikator yang berbeda dengan OPD pada umumnya, karena indikatornya menyangkut penguatan kelembagaan pemerintah. Indikator untuk kelembagaan pemerintah berupa indikator terdiri dari : **Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji, % Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji, % Temuan Material** dan pelayanan publik bidang kesehatan. Indikator untuk pelayanan medik rumah sakit berupa Indikator khusus terdiri dari : **BOR, AvLOS, TOI, BTO, GDR, NDR.**

Indikator Program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan di RSUD Labuang Baji dari :

- Indikator input** : Berupa dana APBD (DAK/BLUD/DBH-CHT) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sumber Daya Manusia
- Indikator output** : Tingkat pencapaian pelayanan sesuai rencana, sehingga terjadi peningkatan kualitas pelayanan.
- Indikator benefit/infact** : Indikator yang berpengaruh pada jangka panjang yang menghasilkan keuntungan, dan belum bisa dimonitor pada jangka pendek.

Kegiatan pelayanan kesehatan khususnya RSUD Labuang Baji memiliki kinerja bidang pelayanan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh RSUD Labuang Baji dapat dijelaskan dalam pencapaian sasaran sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Labuang Baji
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji			BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)	A (80-90)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)	A (80-90)	
2	% Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji			85%	87,5%	90%	95%	92%	93%	94%	95%	
3	% Temuan Material			2%	1%	0,5%	0,3%	Belum diaudit APIP	1%	0,5%	0,3%	
4	Tingkat pemanfaatan tempat tidur (%BOR)	60 - 85%		50%	60%	65%	70%	30,92%	60%	65%	70%	
5	Rata-rata lamanya pasien di rawat (AvLOS)	6 - 9 Hari		7 Hari	7 Hari	6 Hari	6 Hari	6 Hari	7 Hari	6 Hari	6 Hari	
6	Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)	1 -3 Hari		3 Hari	3 Hari	3 Hari	2 Hari	12 Hari	10 Hari	3 Hari	2 Hari	
7	Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO)	40 - 50 Kali		40 Kali	40 Kali	40 Kali	45 Kali	21 Kali	40 Kali	40 Kali	45 Kali	
8	Menurunnya Angka Kematian Kasar (GDR)	<45 ‰		45/1000	40/1000	35/1000	30/1000	67,59/1000	40/1000	35/1000	30/1000	
9	Menurunnya Angka Kematian setelah dirawat (NDR)	<25 ‰		30/1000	25/1000	20/1000	15/1000	10,82/1000	25/1000	20/1000	15/1000	

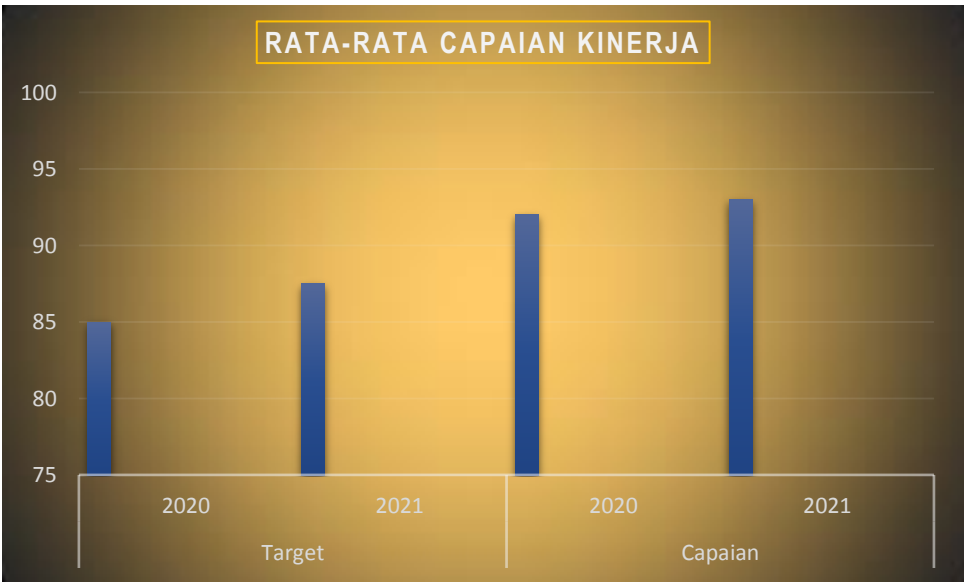
➤ **Nilai SAKIP**

Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji menggambarkan Indikator yang dinilai mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Target yang ingin di capai tahun 2020 dengan nilai BB (70-80) dengan realisasi dengan nilai BB (70-80) dapat dilihat pada grafik berikut ini :



➤ **Rata-rata Capaian Kinerja**

Persentase Capaian Kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dihitung berdasarkan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja. Target yang ingin dicapai 85% dengan Realisasi capaian 92 % dapat dilihat pada grafik berikut ini :



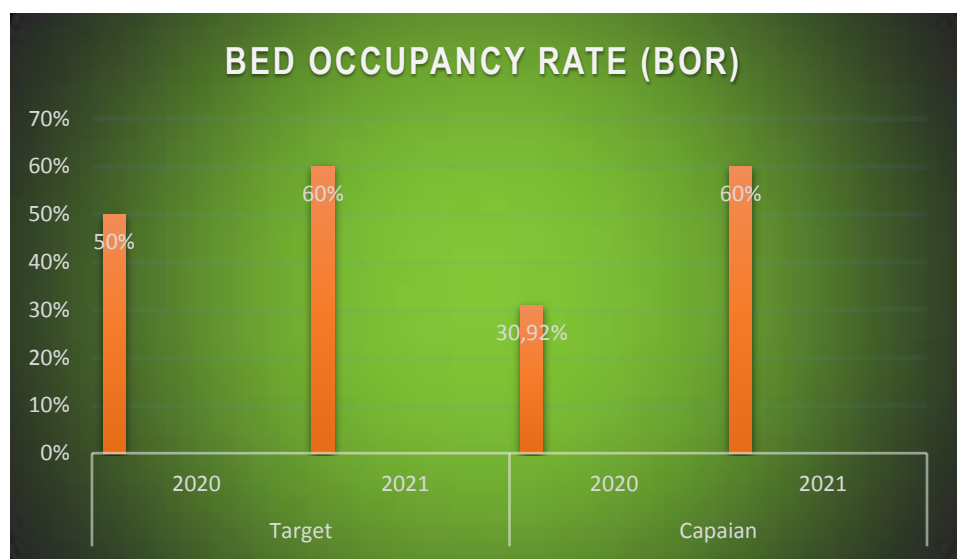
➤ **Temuan Material**

Persentase Temuan Material RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dengan target yang telah ditetapkan tahun 2020 yaitu 2% dengan realisasi masih 0 karena belum di Audit oleh Inspektorat dan BPK - RI dapat dilihat pada grafik berikut ini :



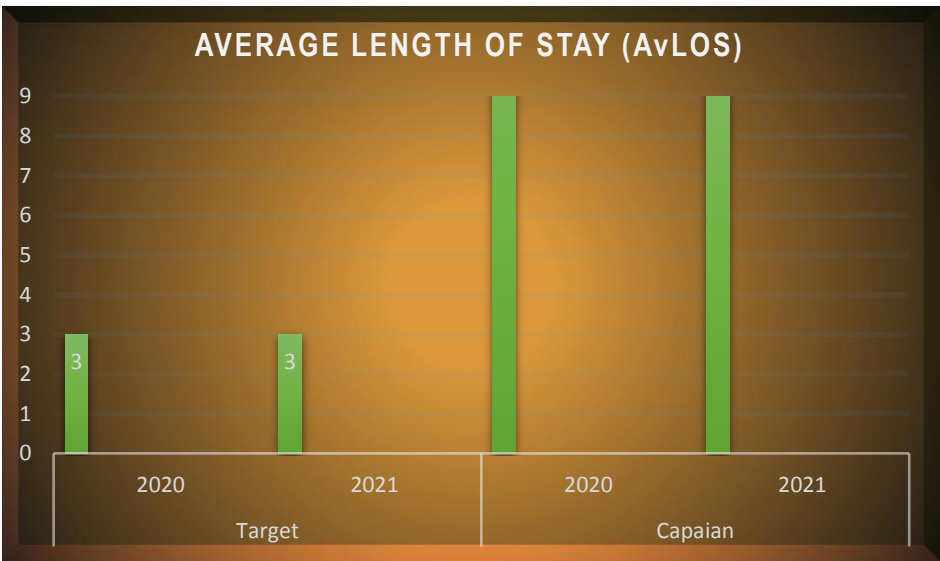
➤ **Bed Occupancy Rate (BOR)**

BOR menggambarkan berapa banyak Tempat Tidur (TT) di rumah sakit yang digunakan dalam suatu masa, dihitung berdasarkan jumlah hari perawatan dalam waktu tertentu dibagi jumlah tempat tidur kali jumlah hari dalam satu satuan waktu kali 100%. Dikatakan ideal jika mencapai 75- 85%. Target BOR RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 yakni 50%. Pencapaian BOR pada tahun 2020 yakni hanya 30,92%. Hal ini disebabkan adanya rasa takut dan keengganan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit dikarenakan RSUD Labuang Baji ditunjuk oleh Pemerintah sebagai pusat rujukan nasional pelayanan dan perawatan pasien COVID-19 (infection centre). Gambaran Bed Occupancy Rate (BOR) pada tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



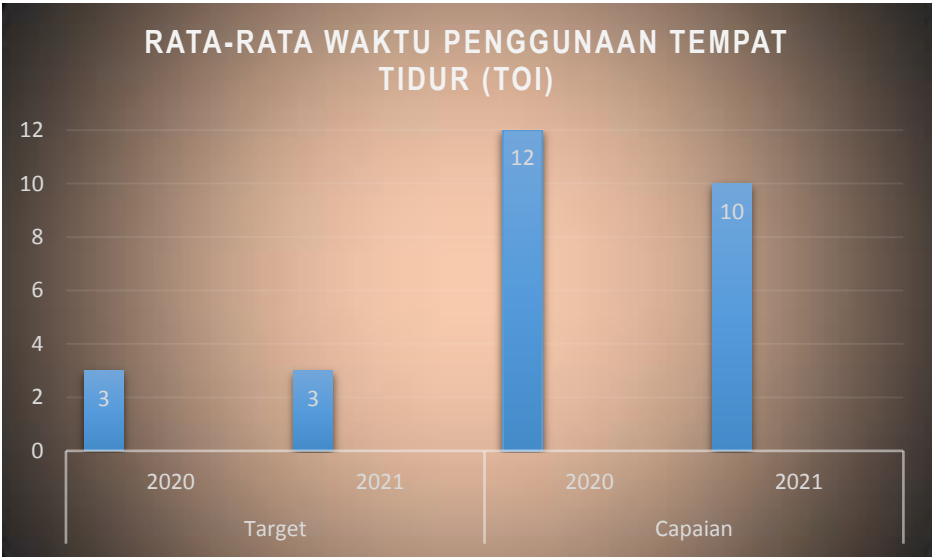
➤ **Average Length of Stay (AvLOS)**

Indikator ini menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan jumlah lama dirawat pasien keluar RS dibagi jumlah pasien keluar RS (hidup + mati). Dikatakan efisien jika AvLOS berkisar antara 6-9 hari. Pada Tahun 2020 AvLOS RSUD Labuang Baji ditargetkan selama 7 hari dan realisasi pada tahun 2020 AvLOS mencapai 6 hari. Hal ini dikarenakan karena pasien yang dirawat adalah pasien yang terinfeksi covid-19 sehingga perawatannya membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga capaian AvLOS berdasarkan Standar Nasional. Berdasarkan penjelasan diatas, Average Length Of Stay (AvLOS) dapat dilihat pada grafik berikut ini :



➤ **Turn Over Interval (TOI)**

Indikator ini menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan jumlah kapasitas tempat tidur – rata jumlah pasien keluar. Periode/jumlah hari perawatan. Rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi, yaitu waktu antara sebuah tempat tidur ditinggalkan pasien sampai dengan saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya, TOI ideal 1-3 hari. Pada Tahun 2020 TOI RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan selama 3 hari, dan realisasi pada tahun 2020 AvLOS mencapai 12 hari. Hal ini dikarenakan karena pasien yang dirawat adalah pasien yang terinfeksi covid-19 sehingga perawatannya membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga capaian TOI berdasarkan Standar Nasional. Berdasarkan penjelasan di atas, Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI) dapat dilihat pada grafik berikut ini :



➤ **Bed Turn Over (BTO)**

Indikator ini menggambarkan berapa kali satu TT ditempati pasien dalam 1 tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah pasien keluar RS (hidup+mati) dalam 1 tahun dibagi jumlah tempat tidur tahun bersangkutan. Dikatakan ideal jika BTO lebih dari 40-50 kali/tahun. Adapun target BTO pada tahun 2020 yakni 40 kali sedangkan pencapaiannya pada tahun 2020 mencapai 25 kali. Hal ini menggambarkan bahwa frekuensi penggunaan tempat tidur di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan masih jauh dari target dan standar ideal rumah sakit. karena banyaknya rumah sakit yang menjadi pesaing (pemerintah/swasta) dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun grafik perkembangan Bed Turn Over (BTO) dapat dilihat pada grafik berikut ini :



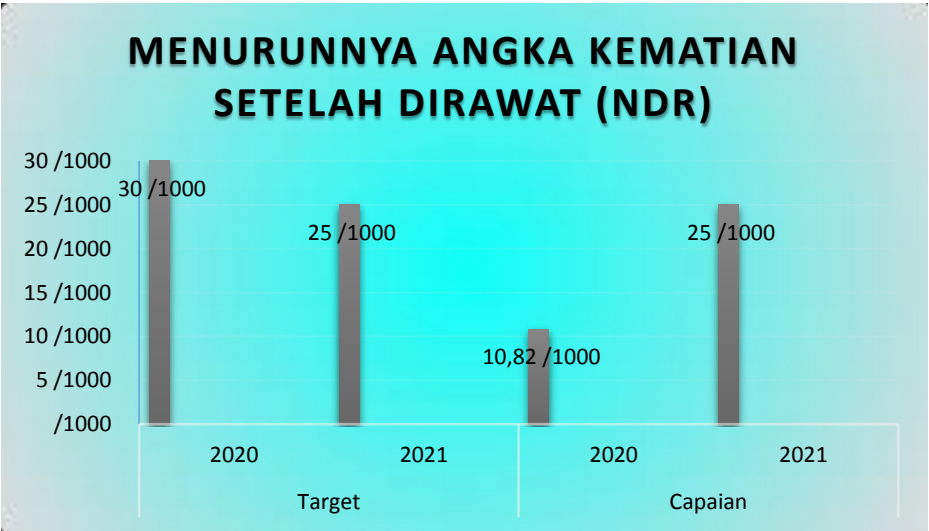
➤ **Menurunnya Angka Kematian Kasar (GDR)**

Indikator ini menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan (jumlah pasien mati seluruhnya dibagi jumlah pasien keluar (hidup + mati)) x 1000%. Semakin rendah GDR berarti mutu pelayanan rumah sakit semakin baik dan angka yang bisa digunakan untuk menilai mutu pelayanan jika angka kematian < 48 jam tinggi. Idealnya GDR adalah < 45% target yang ingin dicapai pada tahun 2020 adalah 45/1000 sedangkan capaiannya 67,59/1000. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah kematian yang disebabkan oleh kasus COVID-19. Gambaran Menurunnya Angka Kematian Kasar (GDR) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



➤ **Menurunnya Angka Kematian Setelah di Rawat (NDR)**

Indikator ini menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan jumlah pasien mati > 48 jam dirawat dibagi jumlah pasien keluar (hidup + mati) kali 1000. Idealnya NDR adalah 25%. Target yang ingin dicapai pada tahun 2020 adalah 30/1000 sedangkan capaiannya 10,82/1000. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas serta ketersediaan sarana penunjang medis yang semakin memadai. Gambaran Menurunnya Angka Kematian Setelah di Rawat (NDR) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 secara umum baik dengan memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan, kinerja pelayanan publik dan keuangan sekaligus merupakan indikator keberhasilan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Berikut ini isu-isu penting dan strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga dokter subspesialis dan konsultan pada keahlian tertentu sehingga jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak maksimal;
2. Kondisi dan ketersediaan bangunan baik dari segi persyaratan teknis, luas dan kenyamanan saat ini belum seluruhnya sesuai dengan standar normatif rumah sakit kelas B, khususnya sarana dan lahan parkir;
3. Ketersediaan peralatan baik segi jumlah, jenis dan kualitas peralatan medis maupun peralatan non medis pada beberapa instalasi/unit masih menjadi permasalahan;
4. Sistem tata kelola rumah sakit masih belum berjalan secara optimal dikarenakan struktur, tupoksi, uraian jabatan dan uraian tugas masih terjadi tumpang tindih;
5. Mengembangkan produk layanan yang lebih bervariasi dikarenakan pergeseran gaya hidup dan semakin meningkatnya umur harapan hidup, angka kejadian penyakit seperti stroke, cancer, serta meningkatnya pasien geriatri menjadi peluang bagi rumah sakit untuk dapat mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut;

6. Perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat, teknologi dan informasi membuat masyarakat semakin memiliki tuntutan terhadap pelayanan kesehatan dengan kualitas yang lebih baik. Masyarakat semakin mengerti akan hak-haknya sebagai pasien, semakin mandiri dalam menentukan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan digunakan;
7. Kehadiran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Perguruan Tinggi lainnya yang ada di kota Makassar menjadi peluang bagi rumah sakit dalam pemenuhan kebutuhan SDM ke depan, serta kerjasama dalam mewujudkan rumah sakit pendidikan provinsi;
8. Kemajuan teknologi informasi yang pesat menyebabkan rumah sakit perlu memperhatikan pentingnya **management information system**, agar informasi dan data yang begitu melimpah, dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah dalam memberikan jasa layanan pasien dan masyarakat secara umum;
9. Semakin banyaknya fasilitas kesehatan baik rumah sakit, klinik dan dokter praktek menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di kota Makassar menjadi semakin kompetitif.

Pemasalahan tersebut di atas yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan berdampak terhadap sebagai berikut :

1. Belum optimalnya layanan unggulan karena diperlukan dukungan dari unit penunjang untuk memperlancar layanan, hal ini terkait dengan sarana dan prasarana serta peralatan yang dibutuhkan;
2. Belum optimalnya sistem monitoring, evaluasi, dan perbaikan secara berkesinambungan;
3. Belum optimalnya sistem intergrasi layanan kesehatan, kaitannya dengan penelitian dan pengembangan;
4. Belum optimalnya sistem budaya kerja termasuk sistem pemberian reward dan Punishment;
5. Belum optimalnya SIM RS yang terkoneksi ke seluruh bagian/ Instalasi/ Unit yang ada di rumah sakit;
6. Pembayaran klaim dari pihak BPJS Kesehatan yang tidak lancar dan dibayar tidak sesuai dengan tagihan, hal ini mempengaruhi kondisi rumah sakit terutama perihal pembayaran dengan pihak distributor obat maupun pembayaran jasa pelayanan untuk tenaga di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;

7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan baik oleh Rumah Sakit maupun pihak independen sudah mendapat nilai dalam kategori baik. Menurut hasil analisa survey, beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain kecepatan pelayanan, lama waktu tunggu pasien, alur pelayanan, dan beberapa hal terkait sarana penunjang dan kebersihan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Semakin berkembangnya rumah sakit swasta lain yang menjadi pesaing bagi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit utamanya sebagai upaya menuju akreditasi versi SNARS;
3. Tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang prima.

b. Peluang

1. Meningkatnya pertumbuhan penduduk membuka pasar pelayanan kesehatan;
2. Muara Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat termasuk didalamnya pelayanan kesehatan;
3. Komitmen yang tinggi daerah dalam mewujudkan kesehatan gratis bagi masyarakat;
4. Semakin intensifnya pembangunan infrastruktur rumah sakit;
5. Semakin meningkatnya upaya peningkatan kesehatan dalam melindungi kepentingan masyarakat;
6. Semakin meningkatnya peran serta/partisipasi masyarakat dalam kegiatan peningkatan kesehatan;
7. Hubungan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan dan kemitraan dengan rumah sakit.

Formulasi isu-isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

1. Pemenuhan SDM terutama dokter sub spesialis;
2. Lebih pro aktif dalam upaya promosi rumah sakit;
3. Meningkatkan sarana prasarana dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
4. Memaksimalkan biaya diklat melalui APBD setiap tahun untuk meningkatkan kemampuan pegawai.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan telah disesuaikan dengan Perencanaan Kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2022, dapat dilihat pada tabel T-C.31

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

Lembar dari

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100% 100% 99,70%	126.052.710.955,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100% 100% 100%	140.824.416.067,91	
01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	64.000.000,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	327.500.000,00	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	175.000.000,00	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	28.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	60.000.000,00	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	28.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	75.000.000,00	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	3.500.000,00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	4.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	4.500.000,00	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Fisik dan Anggaran yang tersusun dan dilaporkan	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Fisik dan Anggaran yang tersusun dan dilaporkan	1 Laporan	6.000.000,00	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Laporan	3.500.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	72.572.308.715,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	77.424.416.067,91	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	8400 OB	72.566.308.715,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	8400 OB	77.366.916.067,91	
02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Laporan	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Laporan	18.500.000,00	
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	4.500.000,00	
04	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan	2 Laporan	2.500.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan	2 Laporan	6.000.000,00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD yang Tersusun	18 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD yang Tersusun	18 Laporan	28.500.000,00	
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100%	3.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100%	25.000.000,00	
01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	3 Laporan	3.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	3 Laporan	25.000.000,00	
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian kinerja ASN	100%	11.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian kinerja ASN	100%	147.500.000,00	
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	0 Orang	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	0 Orang	-	
02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	12 Laporan	3.500.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	12 Laporan	22.500.000,00	
03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah aparatur PD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	7.500.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah aparatur PD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	125.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	100.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	350.000.000,00	
01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	40 Kali	100.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	40 Kali	350.000.000,00	
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.000.000.000,00	
01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	5 Unit	100.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	5 Unit	1.000.000.000,00	
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.066.402.240,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.800.000.000,00	
01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Gedung RS yang terpelihara kebersihannya	7 Gedung	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Gedung RS yang terpelihara kebersihannya	7 Gedung	1.300.000.000,00	
			Jumlah Jasa Pegawai Pemerintah Non ASN yang terbayarkan	2628 OB	3.066.402.240,00			Jumlah Jasa Pegawai Pemerintah Non ASN yang terbayarkan	2628 OB	4.500.000.000,00	
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	136.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	750.000.000,00	
01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung RS yang dipelihara	5 Unit	136.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung RS yang dipelihara	5 Unit	750.000.000,00	
09	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase peningkatan pendapatan BLUD	10%	50.000.000.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase peningkatan pendapatan BLUD	10%	55.000.000.000,00	
01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Makassar	Jumlah Pendapatan BLUD	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Makassar	Jumlah Pendapatan BLUD	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS dalam kondisi baik	90%	31.235.500.000,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS dalam kondisi baik	95%	27.850.000.000,00	
01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Labuang Baji	100%	31.150.500.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Labuang Baji	100%	26.900.000.000,00	
01	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	3 Unit	100.000.000,00	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	3 Unit	500.000.000,00	
02	Pengadaan Alat KesehatanAlat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah alat-alat kesehatan/ alat penunjang yang diadakan	30 Jenis	30.150.500.000,00	Pengadaan Alat KesehatanAlat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah alat-alat kesehatan/ alat penunjang yang diadakan	30 Jenis	24.650.000.000,00	
03	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kota Makassar	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara	50 Jenis	-	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kota Makassar	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara	50 Jenis	100.000.000,00	
04	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya	Kota Makassar	Jumlah habis pakai lainnya yang diadakan	100 Jenis	750.000.000,00	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya	Kota Makassar	Jumlah habis pakai lainnya yang diadakan	100 Jenis	750.000.000,00	
05	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah pemeliharaan sarana fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara	0 Paket		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah pemeliharaan sarana fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara	0 Paket	-	
06	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara	3 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara	3 Unit	400.000.000,00	
07	Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan yang diadakan	50 Jenis	100.000.000,00	Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan yang diadakan	50 Jenis	500.000.000,00	
02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Cakupan Promosi Pelayanan Kesehatan di RS	100%	10.000.000,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Cakupan Promosi Pelayanan Kesehatan di RS	100%	100.000.000,00	
01	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Jenis	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Jenis	100.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Cakupan ketersediaan Sistem Informasi RS yg Terintegrasi	100%	25.000.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Makassar	Cakupan ketersediaan Sistem Informasi RS yg Terintegrasi	100%	350.000.000,00	
01	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Layanan Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola	10 Layanan	25.000.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Layanan Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola	10 Layanan	350.000.000,00	
04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Cakupan peningkatan standar pelayanan kesehatan	100%	50.000.000,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Makassar	Cakupan peningkatan standar pelayanan kesehatan	100%	500.000.000,00	
01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8 Izin	-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8 Izin	150.000.000,00	
02	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah survey akreditasi RS yang dilaksanakan	1 Kali	50.000.000,00	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah survey akreditasi RS yang dilaksanakan	1 Kali	350.000.000,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	65%	45.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	100%	375.000.000,00	
01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	-	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	25.000.000,00	
01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Laporan	-	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Laporan	25.000.000,00	
02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	45.000.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	350.000.000,00	
02	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pegawai RS yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi SDM	50 Orang	45.000.000,00	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pegawai RS yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi SDM	50 Orang	350.000.000,00	
JUMLAH					157.333.210.955,00					169.049.416.067,91	

2.5. Penelahaan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud yang sesuai dalam RPJMD Pemerintah Sulawesi Selatan 2018-2023 yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Rencana kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan merupakan hasil dari usulan dan diskusi melalui pembahasan internal rumah sakit. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut :

Tabel T-C.32.
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
 Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan sarana perparkiran	Makassar	Tersedianya sarana perparkiran yang memadai	3 Lantai	Lanjutan 2019

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rumah Sakit oleh WHO (1957) diberikan batasan yaitu suatu bahagian menyeluruh, (Integrasi) dari organisasi dan medis, berfungsi memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun rehabilitatif, dimana output layanannya menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan, rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan tenaga kesehatan serta untuk penelitian biososial.

Fungsi rumah sakit selain yang di atas juga merupakan pusat pelayanan rujukan medik spesialistik dan sub spesialistik dengan fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan (kuratif) dan Pemulihan (rehabilitasi pasien) (Depkes R.I. 1989) Maka sesuai dengan fungsi utamanya tersebut perlu pengaturan sedemikian rupa sehingga rumah sakit mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada surat keputusan Menteri Kesehatan RI No. 983/ Menkes/17/1992 tentang pedoman organisasi rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik, dan sub spesialistik, sedangkan klasifikasi didasarkan pada perbedaan tingkat menurut kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan yaitu rumah sakit kelas A, Kelas B, (Pendidikan dan Non Pendidikan) kelas C dan Kelas D.

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Adanya kemajuan teknologi disertai dengan penggunaan cara-cara baru dibidang diagnostik dan terapeutik mengharuskan rumah sakit mempekerjakan berbagai profesi kedokteran dan profesi lain sehingga rumah sakit menjadi organisasi padat karya spesialis dan merupakan tempat dimana terjadi proses pengubahan dari masukan menjadi luaran.

- a. Masukan utama adalah dokter, perawat personil lainnya, prasarana, sarana peralatan dan sebagainya.

b. Sedangkan untuk menilai pemanfaatan tenaga dipergunakan digunakan indikator :

- Rasio kunjungan dengan jumlah tenaga perawat jalan.
- Rasio jumlah hari perawatan dengan jumlah tenaga perawat inap.
- Rasio jumlah pasien intensif dengan jumlah tenaga perawat yang melayani.
- Rasio persalinan dengan tenaga bidan yang melayani.

Demikian juga Indikator untuk penilaian cakupan pelayanan adalah :

- Rata-rata kunjungan per hari;
- Rata-rata kunjungan baru per hari;
- Rasio kunjungan baru dengan total kunjungan;
- Jumlah rata-rata pasien IRD per hari;
- Rata-rata pasien intensif per hari;
- Rata-rata pemeriksaan radiologi per hari;
- Prosentase r/ yang dilayani terhadap r/ rumah sakit;
- Prosentase item obat dalam formularium;
- Jumlah pelayanan ambulans;
- Rasio banyaknya cucian dengan pasien rawat inap;
- Prosentase penyediaan makanan khusus;
- Rasio pasien rawat jalan terhadap jumlah penduduk dalam, *catchment area*;
- Admission use rate;
- Hospitalization rate.

Arah kebijakan bidang kesehatan tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Kementerian Kesehatan RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/ kabupaten/ kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu :

1. Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit sesuai dengan SPM sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat dan diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang;
2. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM yang telah ditetapkan;
3. Penyediaan pelayanan jaminan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan mudah diakses.

Prioritas pembangunan nasional meliputi 11 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dan 3 prioritas lainnya. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan kebijakan.

Untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yaitu **“Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter”** dan visi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, yaitu : **“Menjadi Rumah Sakit Unggulan Provinsi yang Inovatif dan Kompetitif Tahun 2023”** yang diharapkan bersinergi dan mendukung pencapaian target serta tujuan pembangunan, khususnya pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Selatan.

Adapun keterkaitan antara misi kebijakan daerah dengan kebijakan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

- Misi : 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi, Melayani dan Inovatif;
 4. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif;

Dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan Periode Tahun 2018-2023 yang menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi rujukan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2018-2023 yaitu Program Baruga Pelayanan Masyarakat

RSUD Labuang Baji dalam melaksanakan program dan kegiatannya harus berpedoman dan bersinergi dengan Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagai bentuk implementasi dan kolaborasi yang baik. Seperti yang telah digambarkan sebelumnya terkait Visi, maka Misi RSUD Labuang Baji dapat disebutkan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Prima yang Inovatif;
2. Mewujudkan Profesionalisme SDM yang Kompetitif;
3. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas; dan
4. Mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Rumah Sakit.

Sebagai wujud pelaksanaan Visi dan Misi tersebut, RSUD Labuang Baji mempunyai 4 (empat) Program Unggulan yang nantinya menjadi landasan dalam berkinerja, yaitu :

1. Pengembangan Kapasitas RS Pendidikan Provinsi;

2. Rumah Sakit Rujukan Layanan Brain and Vascular;
3. Rumah Sakit Rujukan Layanan TB-MDR; dan
4. Rumah Sakit Rujukan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dalam rencana kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Renstra RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Pasien.

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu 5 tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji;
 - b. Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji;
 - c. Persentase Temuan Material.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit, dengan indikator sasaran adalah:
 - a. Tingkat pemanfaatan tempat tidur (%BOR);
 - b. Rata-rata lamanya pasien di rawat (AvLOS);
 - c. Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI);
 - d. Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO);
 - e. Angka kematian kasar (GDR);
 - f. Angka kematian setelah dirawat (NDR).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas;
2. Pencapaian jenis layanan RS yang sesuai kelas RS;
3. Pembuatan sistem indikator kinerja utama RS, pembuatan dan pengukuran kepatuhan terhadap clinical pathway serta pengukuran tingkat kepuasan pelanggan

4. Menjamin ketersediaan struktur organisasi pada seluruh unit yang ada di RS secara efektif, lengkap dengan uraian tugas dan tanggung jawab dan indikator penilaian kinerja seluruh staf RS serta mendorong pencapaian SPM unit-unit di RS;
5. Peningkatan staf dengan kinerja ekselen;
6. Rumah Sakit dapat terakreditasi berdasarkan standar kelas.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2022 mempunyai beberapa program diantaranya :

1. Peningkatan Kinerja Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Pemerintah

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi RSUD RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilaksanakan program peningkatan kinerja dalam rangka penguatan kelembagaan yang diselenggarakan melalui 1 Program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri dari 9 kegiatan dan 22 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✚ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - ✚ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - ✚ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - ✚ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - ✚ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - ✚ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - ✚ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✚ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✚ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD;
 - ✚ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - ✚ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - ✚ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD.
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - ✚ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ✚ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - ✚ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - ✚ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✚ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✚ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✚ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✚ Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 9) Peningkatan Pelayanan BLUD
 - ✚ Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan melalui 2 Program sebagai berikut :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yakni :
 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - ✚ Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - ✚ Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan;
 - ✚ Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi;
 - ✚ Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya;
 - ✚ Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan;
 - ✚ Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan;
 - ✚ Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.
 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - ✚ Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.
 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - ✚ Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.

4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
 - ✚ Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - ✚ Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yakni :
 1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
 - ✚ Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
 - ✚ Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rumusan Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

lembar dari

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah		100%	126.052.710.955,00	APBD		100%	151.032.805.894,49
						Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		100%				100%	
						Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP		99,70%				99,90%	
1	02	01	01.1.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100%	64.000.000,00	APBD		100%	349.500.000,00
1	02	01	01.1.01	01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kota Makassar	3 Dokumen	-	APBD		3 Dokumen	185.000.000,00
1	02	01	01.1.01	01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	28.000.000,00	APBD		1 Dokumen	65.000.000,00
1	02	01	01.1.01	01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	28.000.000,00	APBD		1 Dokumen	80.000.000,00
1	02	01	01.1.01	01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	3.500.000,00	APBD		1 Dokumen	4.000.000,00
1	02	01	01.1.01	01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	4.500.000,00	APBD		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	01	01.1.01	01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Fisik dan Anggaran yang tersusun dan dilaporkan	Kota Makassar	12 Dokumen	-	APBD		12 Laporan	6.500.000,00
1	02	01	01.1.01	01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kota Makassar	4 Laporan	-	APBD		4 Laporan	4.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	01	01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu		100%	72.572.308.715,00	APBD		100%	81.228.305.894,49
1	02	01	01.1.02	01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	Kota Makassar	8400 OB	72.566.308.715,00	APBD		8610 OB	81.165.305.894,49
1	02	01	01.1.02	01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	24 Laporan	-	APBD		24 Laporan	20.000.000,00
1	02	01	01.1.02	01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	Kota Makassar	1 Laporan	3.500.000,00	APBD		1 Laporan	6.500.000,00
1	02	01	01.1.02	01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan	Kota Makassar	2 Laporan	2.500.000,00	APBD		2 Laporan	6.500.000,00
1	02	01	01.1.02	01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulananSemesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD yang disusun	Kota Makassar	18 Laporan	-	APBD		18 Laporan	30.000.000,00
1	02	01	01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		100%	3.000.000,00	APBD		100%	30.000.000,00
1	02	01	01.1.03	01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Kota Makassar	3 Laporan	3.000.000,00	APBD		3 Laporan	30.000.000,00
1	02	01	01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian kinerja ASN		100%	11.000.000,00	APBD		100%	605.000.000,00
1	02	01	01.1.05	01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	0 Orang	-	APBD		600 Orang	330.000.000,00
1	02	01	01.1.05	01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	Kota Makassar	12 Laporan	3.500.000,00	APBD		12 Laporan	25.000.000,00
1	02	01	01.1.05	01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur PD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Makassar	10 Orang	7.500.000,00	APBD		15 Orang	250.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	01	01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor		100%	100.000.000,00	APBD		100%	400.000.000,00
1	02	01	01.1.06	01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	Kota Makassar	40 Kali	100.000.000,00	APBD		45 kali	400.000.000,00
1	02	01	01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100.000.000,00	APBD		100%	2.000.000.000,00
1	02	01	01.1.07	01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	Kota Makassar	5 Unit	100.000.000,00	APBD		5 Unit	2.000.000.000,00
1	02	01	01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	3.066.402.240,00	APBD		100%	6.000.000.000,00
1	02	01	01.1.08	01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gedung RS yang terpelihara kebersihannya	Kota Makassar	7 Gedung	-	APBD		7 Gedung	1.500.000.000,00
						Jumlah Jasa Pegawai Pemerintah Non ASN yang terbayarkan	Kota Makassar	2628 OB	3.066.402.240,00	APBD		2628 OB	4.500.000.000,00
1	02	01	01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik		100%	136.000.000,00	APBD		100%	750.000.000,00
1	02	01	01.1.09	01.1.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	Kota Makassar	5 Unit	136.000.000,00	APBD		5 Unit	750.000.000,00
1	02	01	01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pendapatan BLUD		10%	50.000.000.000,00	BLUD		9.09%	59.670.000.000,00
1	02	01	01.1.10	01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD	Kota Makassar	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	BLUD		60.000.000.000,00	59.670.000.000,00
1	02	1.02.02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS dalam kondisi baik		90%	31.235.500.000,00	APBD		100%	25.200.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Labuang Baji		100%	31.150.500.000,00	APBD		100%	24.550.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Kota Makassar	3 Unit	100.000.000,00	APBD		3 Unit	750.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat KesehatanAlat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan/ alat penunjang yang diadakan	Kota Makassar	30 Jenis	30.150.500.000,00	APBD		25 jenis	22.000.000.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara	Kota Makassar	50 Jenis	-	APBD			50 Jenis	150.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya	Jumlah habis pakai lainnya yang diadakan	Kota Makassar	100 Jenis	750.000.000,00	APBD			100 Jenis	750.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan sarana fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara	Kota Makassar	0 Unit		APBD			3 Unit	400.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara	Kota Makassar	3 Unit	50.000.000,00	APBD			-	-
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan yang diadakan	Kota Makassar	50 Jenis	100.000.000,00	APBD			50 Jenis	500.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Promosi Pelayanan Kesehatan di RS		100%	10.000.000,00	APBD			100%	100.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.02	1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Makassar	2 Jenis	10.000.000,00	APBD			2 Jenis	100.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan ketersediaan Sistem Informasi RS yg Terintegrasi		100%	25.000.000,00	APBD			100%	350.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.03	1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Layanan Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola	Kota Makassar	10 Layanan	25.000.000,00	APBD			10 Layanan	350.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan peningkatan standar pelayanan kesehatan		100%	50.000.000,00	APBD			100%	200.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.04	1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Makassar	8 Izin	-	APBD			10 Izin	200.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.04	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah survey akreditasi RS yang dilaksanakan	Kota Makassar	1 Kali	50.000.000,00	APBD			-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	1.02.03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang Bersertifikasi		65%	45.000.000,00	APBD		70%	585.000.000,00
1	02	1.02.03	1.02.03.1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		100%	-	APBD		100%	35.000.000,00
1	02	1.02.03	1.02.03.1.01	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Makassar	2 Laporan	-	APBD		2 Laporan	35.000.000,00
1	02	1.02.03	1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi		100%	45.000.000,00	APBD		100%	550.000.000,00
1	02	1.02.03	1.02.03.1.02	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai RS yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi SDM	Kota Makassar	50 Orang	45.000.000,00	APBD		50 orang	550.000.000,00
Jumlah									157.333.210.955,00				176.817.805.894,49

Sebagai OPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit mempunyai beberapa fleksibel berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang diperoleh dari pendapatan fungsional pelayanan. Fleksibilitas yang dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, pendapatan fungsional Rumah Sakit yang diperoleh langsung dari pelayanan dan dapat digunakan langsung untuk Belanja Pelayanan (OPD). Pendapatan fungsional tersebut merupakan pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikelola oleh Rumah Sakit yang disimpan dalam kas Rumah Sakit.

Oleh karena itu, rencana target pendapatan fungsional Rumah Sakit pada tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 berdasarkan Review RENSTRA OPD RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel Pendapatan Tahun 2021 dan 2022

No.	Uraian	Target 2021 (Rp.)	Target 2022 (Rp.)
1	Ambulance	5.000.000	5.000.000
2	BPJS Kesehatan	27.000.000.000	30.000.000.000
3	Jasa Pelayanan	15.745.400.000	17.495.400.000
4	Jasa Pelayanan Covid-19	1.220.835.000	1.220.835.000
5	Klaim Covid-19	2.267.265.000	2.267.265.000
6	Laboratorium	600.000.000	600.000.000
7	Lain-lain Penerimaan yang Sah	50.000.000	50.000.000
8	Obat-obatan	670.000.000	700.000.000
9	Obat-obatan BPJS	480.000.000	550.000.000
10	Pemakaian ruangan Bangunan Kantor Layanan ATM	94.500.000	94.500.000
11	Penelitian / Diklat	150.000.000	200.000.000
12	Radiologi	150.000.000	250.000.000
13	Rawat Inap Umum	400.000.000	400.000.000
14	Rawat Jalan	550.000.000	550.000.000
15	Registrasi	60.000.000	60.000.000
16	Tata Usaha	7.000.000	7.000.000
17	Tindakan Operasi	550.000.000	550.000.000
	Jumlah	50.000.000.000	55.000.000.000

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dengan adanya tuntutan dari BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan yang mengharuskan semua Rumah sakit harus terakreditasi demi menjaga kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga rumah sakit harus menjaga kualitas pelayanan dengan meningkatkan sumberdaya yang dimiliki dan selalu berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan guna memenuhi tuntutan masyarakat seiring dengan tata kelola baru di bidang kesehatan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun keempat dari Renstra Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Kaidah Pelaksanaan Renja sebagai berikut :

- 1) Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang disertai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2022;
- 2) Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 digunakan juga sebagai pertimbangan untuk penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit tahun anggaran 2022.
- 3) Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran rumah sakit sendiri maupun stakeholder yang berkepentingan.
- 4) Semoga Rencana Kerja SKPD ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Dokumen Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 disusun dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022. serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait terutama untuk memudahkan akses masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan guna terselenggaranya

upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu kepada masyarakat sebagaimana tujuan pembangunan di bidang kesehatan yakni tercapainya hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Makassar, Juli 2021



Direktur

drg. ABDUL HARIS NAWAWI, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199402 1 001

**MATRIKS USULAN PRIORITAS OPD
UNTUK TAHUN 2022**

NO.	Misi/Sasaran Pembangunan	Program dan Kegiatan	Komponen Anggaran	Volume	Anggaran 2022	Link Kegiatan OPD Lain	Nama OPD terkait
1	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi, Melayani dan Inovatif <i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			145.338.492.026		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	APBD		77.366.916.068		
		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>		8400 OB	77.366.916.068		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD		7.000.000.000		
		<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir)</i>		4 Lantai	7.000.000.000		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD		5.971.575.958		
		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>		2628 OB	5.971.575.958		
		Peningkatan Pelayanan BLUD	BLUD		55.000.000.000		
		<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>		55.000.000.000	55.000.000.000		

Makassar, 04 Mei 2021

RSUD LABUANG BAJI PROV. SULSEL
DIREKTUR,

drg. ABDUL HARIS NAWAWI, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199402 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

Jl. Urip Sumohardjo Km. 5 No. 269 Telp. 453486, 442951, 444336
MAKASSAR

BERITA ACARA

PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN ASISTENSI RANCANGAN RENJA PD
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Pada Hari ini **Kamis** Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, telah dilaksanakan Verifikasi dan Asistensi Rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagai berikut:

I. Bappelitbangda dan Perangkat Daerah

- Bappelitbangda Bidang : PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
- Perangkat Daerah Provinsi : UPT RSKD LABUANGBAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

II Tim Pembahas dan Validasi

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	M. ILYAS, SH, M.Si	KASUBID. PEMBANGUNAN MANUSIA	BAPPELITBANGDA PROV. SULSEL
2	NURBAYA YUSUF, SE, MM	KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN	UPT RSKD LABUANGBAJI PROV SULSEL
3	PRAJA UTAMA P RUKKA, S.IP	STAF BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	BAPPELITBANGDA PROV. SULSEL

III. Menyepakati Hasil Pembahasan dan Klarifikasi sebagai berikut :

- Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target perangkat daerah yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- Memperhatikan dan memastikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, target dan anggaran sinkron dengan Rancangan RKPD Tahun 2022, Perubahan Renstra OPD Tahun 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023

IV. Rencana Tindak Lanjut Hasil Pembahasan dan Klarifikasi :

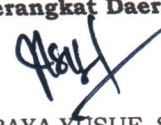
- Berdasarkan Berita Acara hasil Verifikasi dan Asistensi Rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyempurnaan pada rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
- Hasil Verifikasi dan Asistensi Rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 menjadi bahan masukan sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022.

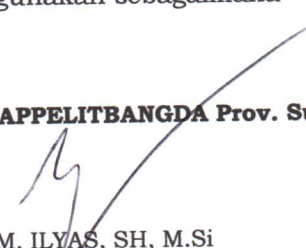
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi dan Asistensi Rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan dari BAPPELITBANGDA Prov. Sulsel dan OPD Prov. Sulsel untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,

Perwakilan Perangkat Daerah Prov. Sulsel

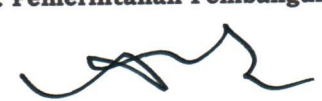
Perwakilan BAPPELITBANGDA Prov. Sulsel


NURBAYA YUSUF, SE, MM


M. ILYAS, SH, M.Si

Mengetahui,

Kabid. Pemerintahan Pembangunan Manusia


Dr. ANDY, M.Si

CATATAN PEMBAHASAN:

1. Bab I : Pada Latar belakang agar ditambahkan proses penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja, RKPD, Renstra dan RAPBD dan landasan hukum terbaru
2. Bab II : Agar ditambahkan penjelasan pada Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD seperti Permasalahan dan hambatan, Dampak terhadap pencapaian visi misi dan capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti.
- 3 Isu Strategis penting dibuatkan permasalahan lalu dibuatkan keterkaitannya pada dampak indikator kinerja layanan Rumah Sakit
- 3 Bab IV : Agar dilengkapi narasi pada penjabaran Tabel Program dan Kegiatan
- 4 Bab VI : Agar ditambahkan narasi pada Penutup yaitu penanggung jawab pelaksanaan Renja PD
- 5 Arial Narrow
- 6 Hapus arah Kebijakan pada Bab III Halaman 41.

Verifikator :



Praja Utama



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

Jl. Urip Sumohardjo Km. 5 No. 269 Telp. 453486, 442951, 444336
MAKASSAR

BERITA ACARA

PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN ASISTENSI RANCANGAN RENJA PD
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Pada Hari ini **Kamis** Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, telah dilaksanakan Verifikasi dan Asistensi Rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagai berikut:

I. Bappelitbangda dan Perangkat Daerah

- Bappelitbangda Bidang : PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
- Perangkat Daerah Provinsi : UPT RSKD LABUANGBAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

II Tim Pembahas dan Validasi

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	M. ILYAS, SH, M.Si	KASUBID. PEMBANGUNAN MANUSIA	BAPPELITBANGDA PROV. SULSEL
2	NURBAYA YUSUF, SE, MM	KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN	UPT RSKD LABUANGBAJI PROV. SULSEL
3	PRAJA UTAMA P RUKKA, S.IP	STAF BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	BAPPELITBANGDA PROV. SULSEL

III. Menyepakati Hasil Pembahasan dan Klarifikasi sebagai berikut :

- Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target perangkat daerah yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- Memperhatikan dan memastikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, target dan anggaran sinkron dengan Rancangan RKPD Tahun 2022, Perubahan Renstra OPD Tahun 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023

IV. Rencana Tindak Lanjut Hasil Pembahasan dan Klarifikasi :

- Berdasarkan Berita Acara hasil Verifikasi dan Asistensi Rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyempurnaan pada rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
- Hasil Verifikasi dan Asistensi Rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 menjadi bahan masukan sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022.

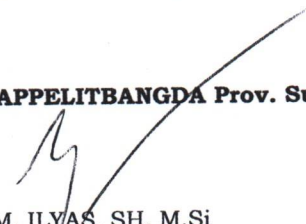
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi dan Asistensi Rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan dari BAPPELITBANGDA Prov. Sulsel dan OPD Prov. Sulsel untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,

Perwakilan Perangkat Daerah Prov. Sulsel

Perwakilan BAPPELITBANGDA Prov. Sulsel


NURBAYA YUSUF, SE, MM


M. ILYAS, SH, M.Si

Mengetahui,

Kabid. Pemerintahan Pembangunan Manusia


Dr. ANDY, M.Si

CATATAN PEMBAHASAN:

1. Bab I : Pada Latar belakang agar ditambahkan proses penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja, RKPD, Renstra dan RAPBD dan landasan hukum terbaru
2. Bab II : Agar ditambahkan penjelasan pada Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD seperti Permasalahan dan hambatan, Dampak terhadap pencapaian visi misi dan capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti.
- 3 Isu Strategis penting dibuatkan permasalahan lalu dibuatkan keterkaitannya pada dampak indikator kinerja layanan Rumah Sakit
- 3 Bab IV : Agar dilengkapi narasi pada penjabaran Tabel Program dan Kegiatan
- 4 Bab VI : Agar ditambahkan narasi pada Penutup yaitu penanggung jawab pelaksanaan Renja PD
- 5 Arial Narrow
- 6 Hapus arah Kebijakan pada Bab III Halaman 41.

Verifikator :



Praja Utama



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

Jl. Urip Sumohardjo Km. 5 No. 269 Telp. 453486, 442951, 444336
MAKASSAR

BERITA ACARA

PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN ASISTENSI RANCANGAN RENJA PD
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Pada Hari ini **Kamis** Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, telah dilaksanakan Verifikasi dan Asistensi Rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagai berikut:

I. Bappelitbangda dan Perangkat Daerah

- Bappelitbangda Bidang : PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
- Perangkat Daerah Provinsi : UPT RSKD LABUANGBAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

II Tim Pembahas dan Validasi

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	M. ILYAS, SH, M.Si	KASUBID. PEMBANGUNAN MANUSIA	BAPPELITBA NGDA PROV. SULSEL
2	NURBAYA YUSUF, SE, MM	KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN	UPT RSKD LABUANGBAJI PROV. SULSEL
3	PRAJA UTAMA P RUKKA, S.IP	STAF BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	BAPPELITBA NGDA PROV. SULSEL

III. Menyepakati Hasil Pembahasan dan Klarifikasi sebagai berikut :

- Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target perangkat daerah yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- Memperhatikan dan memastikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, target dan anggaran sinkron dengan Rancangan RKPD Tahun 2022, Perubahan Renstra OPD Tahun 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023

IV. Rencana Tindak Lanjut Hasil Pembahasan dan Klarifikasi :

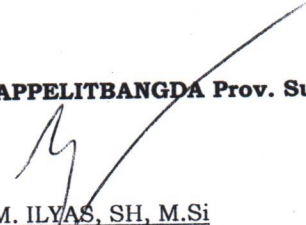
- Berdasarkan Berita Acara hasil Verifikasi dan Asistensi Rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyempurnaan pada rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
- Hasil Verifikasi dan Asistensi Rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 menjadi bahan masukan sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi dan Asistensi Rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan dari BAPPELITBANGDA Prov. Sulsel dan OPD Prov. Sulsel untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,
Perwakilan Perangkat Daerah Prov. Sulsel


NURBAYA YUSUF, SE, MM

Perwakilan BAPPELITBANGDA Prov. Sulsel


M. ILYAS, SH, M.Si

Mengetahui,
Kabid. Pemerintahan Pembangunan Manusia


Dr. ANDY, M.Si

CATATAN PEMBAHASAN:

1. Bab I : Pada Latar belakang agar ditambahkan proses penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja, RKPD, Renstra dan RAPBD dan landasan hukum terbaru
2. Bab II : Agar ditambahkan penjelasan pada Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD seperti Permasalahan dan hambatan, Dampak terhadap pencapaian visi misi dan capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti.
- 3 Isu Strategis penting dibuatkan permasalahan lalu dibuatkan keterkaitannya pada dampak indikator kinerja layanan Rumah Sakit
- 3 Bab IV : Agar dilengkapi narasi pada penjabaran Tabel Program dan Kegiatan
- 4 Bab VI : Agar ditambahkan narasi pada Penutup yaitu penanggung jawab pelaksanaan Renja PD
- 5 Arial Narrow
- 6 Hapus arah Kebijakan pada Bab III Halaman 41.

Verifikator :



Praja Utama